

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia 2021*

### B. Buku

Kalo, Syafruddin. *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004

Wiradipradja, Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2016.

HS, Salim., dan Nurbani Septiana Erlis. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cet. 1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013

Arief, Abdul Salam. *Ontology Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2010  
Iskandar Syah, Mudakhir, *Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum*. Cet.2. Jakarta : Sinar Grafika , 2008.

Gozali, Djoni Sumardi. *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2019.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2002.

Salindeho, John. *Masalah Tanah dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1998

Zaman, Nuruz. *Politik Hukum Pengadaan Tanah*. Bandung : Refika Aditama, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* . Cet 1 Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Salle, Amimuddin. *Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Cet 1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.

Nurdin, Zurifa. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*,Cet.1. Yogyakarta: Samudra Biru,2018.

### C. Jurnal

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana,2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed.1, cet, 17, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI Pres,1986.
- A.P. Parlindungan, tanya jawab *hukum agrarian dan pertanahan, bandung:mandar maju*, 2003.
- Olan Sitorus. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia 2004.
- Musleh Herry. “Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perspektif Al-quran)” *Jurnal Islam*. Vol.9 No. 2. 2008
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: CV Jejak, 2018.
- Dekie GG Kasenda ”Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”. *Jurnal Morality*. Vol.2 No.2, Desember 2015
- Rahayu Subekti, Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Surakarta : USM,2016
- Doni Triono, Penilaian Ganti Kerugian Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia 2015. Tangerang : PKN STAN, 2017.
- Taufan S Nusantara, Analisis Perhitungan Nilai Ganti Kerugian Menggunakan SPI 306 Pada Pengadaan Tanah Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Yogyakarta : UGM, 2016.
- Hamdi, Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum .NTB : UNRAM,2014.
- Vivi Endah Ayuningtyas. Prinsip Sistem Keuangan Syariah. Yogyakarta: UGM,2018.
- Asmuni Mth. Teori Ganti Rugi (DHAMAN) perspektif hukum islam. Yogyakarta: UII,2016

Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad : Antara Teks, Realitas & Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2000.

#### **D. Internet**

1. Badan Pengatur JalanTol “Sejarah Jalan Tol” ,  
<https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah> diakses pada tanggal 24 september 2021
2. Penilaian ID, ”Seperti Apa Proses Pembayaran Uang Ganti Kerugian Pengadaan Tanah?”.  
[https://www.youtube.com/watch?v=13cvI\\_8sB8E&list=WL&index=4](https://www.youtube.com/watch?v=13cvI_8sB8E&list=WL&index=4),di akses pada tanggal 29 November 2021

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*  
\_\_\_\_\_.*Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021.
- \_\_\_\_\_.*Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Pembangunan Umum*. UU Nomor 2 Tahun 2012.
- \_\_\_\_\_.*Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 19 Tahun 2021*.
- \_\_\_\_\_.*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.  
Indonesia. *Undang-undang Pokok Agraria* , UU Nomer 15 Tahun 1960.

\_\_\_\_\_ *.Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 199.*

\_\_\_\_\_ *.Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan  
Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri  
dalam Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan  
umum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Perdata. Cet. 2. Pustaka Buana, 2015.

#### **F. Putusan Pengadilan**

Pengadilan Negeri Depok, “Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2021/PN Dpk”.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, ”Putusan Nomor 1553  
K/Pdt/2021”.